

**PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL, BELANJA BARANG DAN  
JASA, BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA  
(Studi pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-  
2013)**

**Willman Fogati Zebua**

**Noval Adib, Ph.D., Ak., CA.**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya**

**Email: zwillman@gmail.com**

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel belanja daerah terhadap kualitas pembangunan manusia yang tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Data penelitian berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga 2013. Sampel penelitian ini sejumlah 26 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Metode pengujian sampel dilakukan dengan alat analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian menunjukkan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap IPM.

**Kata kunci:** *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial*

---

***THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, GOODS AND SERVICES  
EXPENDITURES, GRANT EXPENDITURES AND  
SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE TOWARDS HUMAN  
DEVELOPMENT INDEX***

***(Study of Regencies and Cities in West Java Province 2011-2013)***

**WillmanFogatiZebua**

**NovalAdib, Ph.D., Ak., CA.**

**Faculty of Economics and Business. Brawijaya University**

**Email: zwillman@gmail.com**

---

**Abstract**

*This research aims to test the influence of government expenditures towards Human Development Index (HDI). The variable of government expenditures used in the research includes Capital Expenditure, Goods and Services Expenditure, Grant Expenditures and Social Assistance Expenditure. The source of data was taken from Audited Financial Report provided by BPK RI from the year of 2011 to 2013. The sample used in this research is 26 regional governments in West Java Province and analyzed using multiple linear regressions. The result indicates that Capital Expenditure and Goods and Services Expenditure have positive and significant influence on HDI, while grant expenditure and social assistance expenditure has no significant influence on the HDI.*

***Keywords:*** *Human Development Index (HDI), Capital Expenditure, Goods and Services Expenditure, Grant Expenditures, Social Assistance Expenditure*

---

## PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Wilayah Indonesia yang luas dengan karakteristik geografis dan penduduk yang beragam membutuhkan perlakuan yang spesifik sehingga diharapkan mampu menggali potensi daerah secara maksimal. Peraturan perundang-undangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pemerintah yang telah disusun daerah diharapkan mampu untuk merangsang pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Melalui peraturan-peraturan tersebut pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi daerah otonom yang memiliki kewenangan yang lebih luas.

Praktik desentralisasi pemerintahan di Indonesiatelah dilakukan sejak era Orde Baru melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, namun perubahan signifikan baru mulai dirasakandi era reformasi, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelimpahkan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengatur posisi dan kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Daerah otonom tersebutdiberikan wewenangnya besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berada di wilayah masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota merupakan daerah otonom. Gubernur, Bupati dan Walikota memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kewenangan daerah otonom tersebut diharapkan dapat memicu pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan tersebut dalam Belanja Daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Rencana pendapatan dan belanja daerah tersebut disusun dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang disahkan bersama-sama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hakikat APBD yang disusun oleh pemerintah daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sehingga setiap belanja dalam program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut. Belanja Daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Lebih lanjut, PP nomor 71 tahun 2010 mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya.

Menurut Badrudin (2012:21), Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk belanja operasional maupun belanja modal diharapkan akan meningkatkan aktivitas yang memicu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, diharapkan sejalan dengan peningkatan alokasi pendapatan masyarakat untuk konsumsi kebutuhan primer,

sekunder dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut lebih kaya, lebih sehat, dan lebih berpendidikan sebagai indikator pembangunan manusia.

Indikator yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur berdasarkan 3 indikator utama yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi. Pengukuran IPM dilakukan dengan mengukur dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Faktor-faktor yang diukur dalam IPM tentunya sangat terkait dengan peran dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja di dalam program dan kegiatan yang ada di APBD.

Struktur belanja program dan kegiatan dalam APBD sangat berperan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera. Pengalokasian anggaran belanja ke pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan APBD sendiri tidak terlepas proses politik di daerah antara pihak eksekutif dan legislatif. Adanya tarik-ulur kepentingan atas penganggaran belanja mengakibatkan struktur alokasi APBD bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dewasa ini, struktur APBD dan alokasi belanja APBD di berbagai daerah dinilai masih belum efektif. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan (Yudhoyono, 2011).

Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras anggarannya untuk membiayai belanja pegawai antara lain disebabkan oleh: *Pertama*, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. *Kedua*, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. *Ketiga*, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah (Prayitno, 2012).

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 43 juta jiwa. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat dan termasuk kategori menengah atas. Selain itu, dengan membandingkannya dengan IPM secara nasional dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Jawa Barat tidak memiliki selisih yang besar dengan IPM Nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Tabel 1. IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2013

Tahun	IPM Jawa Barat	IPM Nasional
2011	72.73	72.77
2012	73.11	73.29
2013	73.58	73.81

Sumber: BPS (diolah)

Peneliti merasa perlu untuk melihat hubungan antara alokasi belanja yang dilakukan dengan IPM suatu wilayah. Variabel yang diteliti pengaruhnya adalah alokasi Belanja Modal dan Belanja Operasional dengan mengecualikan Belanja Pegawai dari kelompok Belanja Operasional, dengan pertimbangan bahwa Belanja Pegawai adalah belanja yang diberikan kepada pegawai pemerintah itu sendiri, sehingga tidak langsung terkait dengan kinerja pemerintah dalam membangun kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Sehingga Belanja Operasional yang akan diteliti dipersempit menjadi Belanja barang, Belanja Hibah, belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah pengaruh belanja modal, belanja barang, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2013?

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut: (i) Variabel Independen yang diteliti adalah Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; (ii) Variabel Dependen yang diteliti adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia; (iii) Objek Penelitian yang digunakan adalah seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 sampai dengan 2013.

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, memerlukan upaya-upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Saragih (2003:11) menyatakan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sentralistis dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralistis mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat pusat. Pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah secara otonom.

Praktik pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang.

Badrudin (2012:15) menyatakan bahwa beragamnya daerah di Indonesia yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa/kelurahan membutuhkan sistem yang mampu mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dan daerah kaya membantu daerah miskin. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip seluas-luasnya diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan prinsip nyata memiliki arti bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan

daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Menurut Widjaja (2002:7), melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Kuangan daerah Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah.

Instrumen utama yang digunakan dalam mengelola keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD mengatur seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. APBD ditetapkan bersama antara eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) untuk kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih jauh, dalam penjelasan PP 58 tahun 2005 dinyatakan bahwa dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari kegiatan yang dianggarkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Penerimaan dan belanja yang dianggarkan dalam APBD akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan program sendiri diarahkan dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada

legislatif dalam hal ini DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan legislatif, pemerintah daerah sebagai eksekutif bersama dengan legislatif membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (SAP-Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, paragraf 21).

Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah pusat dan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP mengklasifikasikan belanja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran menurut klasifikasi ekonomi. Untuk pemerintah daerah, klasifikasi ekonomi belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap dan belanja Aset Lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Standar Akuntansi Pemerintah mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk belanja pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, dan bantuan sosial. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 mendefinisikan Belanja pegawai sebagai belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya gaji yang bersifat rutin. Belanja pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai dalam APBD dijabarkan menjadi 2 kategori yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan gaji dan honorarium rutin yang sifatnya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, sedangkan belanja langsung digunakan untuk menganggarkan honorarium yang langsung terkait kegiatan. Dalam pertanggungjawabannya di laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah tidak

mensyaratkan pemisahan kategori belanja langsung dan tidak langsung, sehingga belanja langsung dan tidak langsung disajikan sebagai satu kesatuan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa umumnya dianggarkan untuk membiayai operasional dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seperti belanja untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas pegawai, dan pemeliharaan aset.

Belanja modal berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja bunga berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan sebelumnya. Permendagri 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemberian hibah dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Kriteria pemberian bantuan sosial adalah diberikan berupa uang/barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*(HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian tiga hal mendasar pembangunan manusia yaitu (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (Mirza, 2012:4).

Badrudin (2012:154) menyebutkan bahwa komponen IPM adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup yang dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data

Susenas. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan *Human development Report* (HDR) sejak tahun 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*).

Badan Pusat Statistik (2008:3) menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sangat memperhatikan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan skala internasional, IPM dikategorikan menjadi kategori tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori menengah atas ( $66 \leq IPM < 80$ ), kategori menengah bawah ( $50 \leq IPM < 66$ ) dan kategori rendah ( $IPM < 50$ ). Disebutkan pula bahwa sejak tahun 1996, IPM Indonesia telah mencapai level menengah atas, kecuali pada tahun 1999 sampai 2002 yang turun ke level menengah bawah akibat krisis ekonomi. Baru pada tahun 2004 level capaian IPM kembali meningkat seperti semula dan sampai sekarang capaian tersebut masih stagnan pada level menengah atas (BPS, 2012).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian tentang hubungan antara belanja daerah dan Indeks Pembangunan manusia antara lain dilakukan oleh Mirza (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Hasil penelitian Mirza menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian lain dilakukan oleh Hendarmin (2012) yang meneliti pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Kalimantan Barat. Hasilnya menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan. Christy dan Adi (2009) yang meneliti hubungan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia memperoleh hasil yang serupa yaitu Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM.

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Penelitian Mirza (2012) menemukan pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal terhadap IPM. Berdasarkan bukti empiris tersebut, maka penulis mengambil hipotesis pertama:

$H_1$  : Alokasi Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Badrudin (2012:20) menyebutkan bahwa belanja pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa

yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhir akan berpengaruh pada kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis mengambil hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Alokasi Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat. Penganggaran hibah ini dilakukan sesuai dengan program pemerintah setempat yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Alokasi Belanja hibah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang dianggarkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil hipotesis keempat sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Alokasi Belanja Bantuan Sosial Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*). Penelitian hipotesis umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro dan Supomo, 2002). Pengujian yang dilakukan yaitu apakah variabel belanja modal, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan dan kemudahan mendapatkannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 dari 27 pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011, 2012 dan 2013. Kabupaten yang tidak diikutsertakan dalam sampel yaitu Kabupaten Pangandaran dengan pertimbangan kabupaten tersebut baru berdiri tahun 2012 dan belum membuat Laporan Keuangan tahun 2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat berupa angka Indeks Pembangunan Manusia dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung, yaitu berupa nilai realisasi belanja dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumen. Dokumen yang dikumpulkan meliputi buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Faisal, 1990: 77). Permintaan data dalam bentuk dokumen disampaikan oleh peneliti kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gambaran output dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a)Alokasi Belanja modal; (b) Alokasi Belanja barang; (c)Alokasi Belanja hibah; (d)Alokasi Belanja bantuan sosial; dan (d)Alokasi Belanja bantuan keuangan.Keseluruhan nilai yang digunakan dalam variabel independen merupakan persentase nilai realisasi belanja yang dialokasikan dibandingkan dengan total belanja yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan telah diaudit oleh BPK RI.

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesa adalah metode statistik regresi linier berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Persamaan yang digunakan untuk pengujian hipotesa adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Y	=	IPM
a	=	konstanta
$\beta_{1-5}$	=	Koefisien regresi variabel independen
$X_1$	=	alokasiBelanja Modal
$X_2$	=	alokasiBelanjaBarang
$X_3$	=	alokasiBelanjaHibah
$X_4$	=	alokasiBelanjaBantuanSosial

Sebelummasukkeresregresi linier berganda, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat. Perhitungan analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak SPSS 21 for Windows. Tahap-tahap pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut: (a) Uji Normalitas digunakan untuk menganalisis ketajaman dari distribusi data yang digunakan. Uji kenormalan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk menghasilkan grafik probability plot (P-Plot) yang menyajikan distribusi data secara visual. Selain itu, juga dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang dapat digunakan untuk menguji normalitas dari residual data; (b) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada gejala autokorelasi dalam model regresi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW); (c) Pengujian multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*; dan (d) Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot*.

Tahap pengujian melalui analisis regresi berganda dilakukan dengan melalui pengujian koefisien determinasi dan uji t. Setelah melakukan pengujian hipotesis, maka langkah selanjutnya yaitu pembahasan atas hasil hipotesis yang telah diuji dan mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (BPS Jawa Barat). Secara administratif sejak tahun 2012, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang paling terakhir berdiri, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang telah diperoleh untuk masing-masing variable penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif berusaha untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), seberapa jauh data data bervariasi (standar deviasi) dan sebagainya (santoso, 2002). Deskripsi data pada penelitian ini dilihat pada Tabel 2.

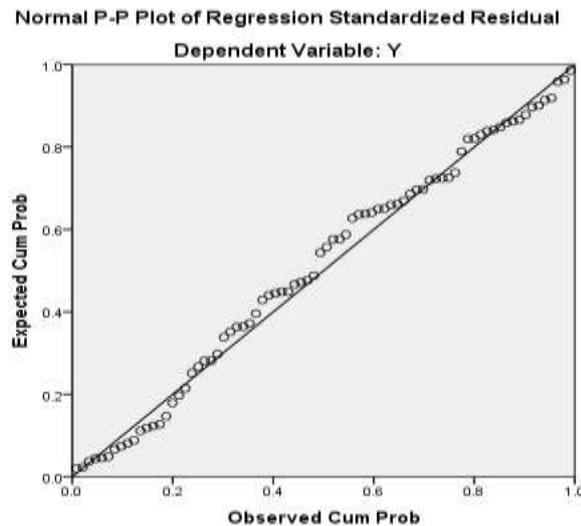
**Tabel 2 Deskripsi Variabel Penelitian**

		IPM	X1	X2	X3	X4
N	Valid	78	78	78	78	78
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		73.4904	17.9190	18.2259	3.5115	1.4247
Std. Deviation		2.63198	7.10033	5.55360	2.40807	1.69591
Variance		6.927	50.415	30.842	5.799	2.876
Minimum		68.40	2.16	8.47	.00	.00
Maximum		80.14	37.30	41.76	11.78	9.34

### Uji Normalitas

Berdasarkan grafik pada gambar 4.1, dapat dilihat sebaran titik berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

**Gambar 1 Normal Probability Plot**



Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21

Untuk memperkuat keyakinan akan asumsi normalitas dari model regresi, dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample test* Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail atas normalitas data.

Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji asumsi normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006).

**Tabel3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.05187728
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.044
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.709

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21

Hasil pengujian *one-sample K-S* dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21 pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *Asymptotic Significance* sebesar 0,709. Nilai tersebut diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

#### Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa Angka D-W adalah sebesar 0,563 yang berada pada rentang -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar variabel.

#### Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance*. Jika nilai VIF dan *tolerance* di sekitar angka 1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

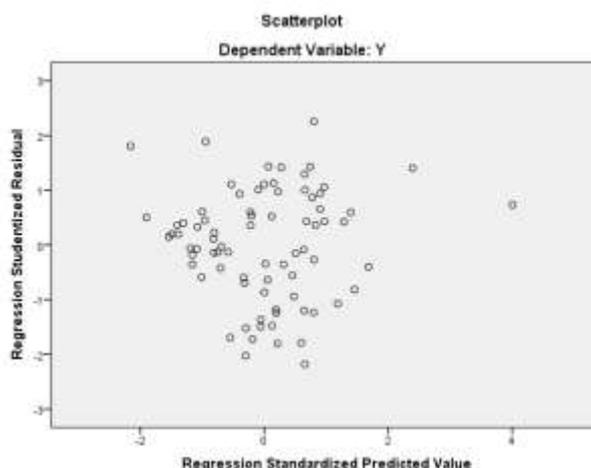
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.993	1.007
X2	.977	1.023
X3	.984	1.017
X4	.970	1.031

Hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.3 memperlihatkan nilai *tolerance* dan VIF dari seluruh variabel independen berada pada nilai di sekitar angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

#### Uji Heterokedastisitas

Dengan melihat hasil uji heterokedastisitas pada *scatterplot* di Gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik pada diagram tersebut menyebar sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

**Gambar 3 Hasil uji heterokedastisitas dengan *Scatterplot***



**Pengujian Regresi Linear Berganda**

Pengujian regresi linear berganda yang dilakukan pada model penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,248 yang diketahui dari nilai *R-Square* yang dihasilkan dari model yang diteliti. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan menunjukkan pengaruh variasi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 35%.

**Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistic t digunakan untuk menentukan pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Hasil pengujian pada Tabel 5 menunjukkan nilai koefisien dan signifikansi pada masing-masing variabel.

**Tabel 5 Hasil uji statistik t (t-test)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	67.706	1.267		53.442	.000
X1	.085	.038	.230	2.254	.027
X2	.180	.049	.380	3.704	.000
X3	.151	.112	.138	1.349	.181
X4	.311	.160	.201	1.946	.056

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan pengujian parsial di atas, diketahui bahwa X1 dan X2 memiliki nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan variabel X3 dan X4 memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh terhadap Y.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka persamaan model peneliti dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 67,706 + 0,085X_1 + 0,18X_2$$

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia

- X<sub>1</sub>: Belanja Modal
- X<sub>2</sub>: BelanjaBarangdanJasa
- X<sub>5</sub>: BelanjaBantuanKeuangan

Berdasarkan hasil uji signifikansi individual (uji t) diperoleh kesimpulan bahwa alokasi Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mirza (2012), Hendarmin (2012), Christy dan Adi (2009) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan pada IPM.

Provinsi Jawa Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013) telah menetapkan misi untuk mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Strategi yang diterapkan antara lain dengan meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan (a) peningkatan konservasi sumber daya air; (b) peningkatan pendayagunaan sumber daya air, (c) peningkatan pengendalian daya rusak air, (d) pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.

Penelitian Abdul Muqin (2011) mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang mengambil sampel 22 pemerintah daerah di Jawa Barat menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur di Jawa Barat berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Badrudin (2012) akan berpengaruh pada meningkatnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai IPM.

Pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang publik bagi masyarakatnya akan memberikan efek multiplier yang besar kepada perekonomian Jawa Barat. Pengeluaran pemerintah daerah terutama untuk infrastruktur ekonomi dan sosial akan menjadi stimulator yang akan memberikan dampak yang lebih baik dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat pada rentang tahun 2011-2013 rata-rata mengalokasikan 17,92% anggarannya untuk belanja modal. Berdasarkan penelitian ini, struktur alokasi belanja modal tersebut telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan. Terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan komponen IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Badrudin (2012), bahwa aktivitas belanja pemerintahan akan menimbulkan respon dari produsen untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Aktivitas ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah di Jawa Barat rata-rata mengalokasikan 18,22% anggarannya untuk belanja barang dan jasa. Dengan alokasi belanja tersebut, pemerintah melakukan belanja barang seperti pembelian alat tulis kantor, makan dan minum rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan dan bangunan publik serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang akan memicu perekonomian untuk berkembang.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari perhitungan Pendapatan Nasional yang dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan persamaan (Mankiw, 2007:25):

$$Y=C+I+G+NX$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

NX = Ekspor neto

Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,06% dimana setiap sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 9,66%. Selain itu sektor persewaan dan jasa meningkat 8,35% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,57% (BPS,2014:2).

Pengeluaran pemerintah, dalam hal ini adalah realisasi belanja dari APBD pemerintah daerah di Jawa Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pengalokasian belanja pemerintah akan memicu pertumbuhan di sektor-sektor yang menerima pengeluaran pemerintah tersebut. Pertumbuhan ekonomi inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang merupakan salah satu faktor dalam perhitungan IPM.

Belanja hibah menurut peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, alokasi Belanja Hibah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja hibah dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, belanja hibah yang dilakukan pemerintah di Provinsi Jawa Barat tidak berpengaruh pada IPM. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Jawa Barat masih menitikberatkan alokasi anggaran pada sektor lain terutama terkait dengan pemenuhan standar layanan minimum bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuwani (2011) tentang alokasi belanja daerah sebelum dan pada saat dilakukannya pemilihan kepala daerah menyimpulkan bahwa alokasi belanja hibah merupakan salah satu belanja yang akan meningkat saat menjelang pemilihan kepala daerah, terutama untuk pemerintah daerah dengan salah satu calon kepala daerah incumbent. Pemberian hibah kepada masyarakat seringkali didasarkan pada pertimbangan politis saat menjelang pemilihan kepala daerah sehingga dalam penerapannya tidak selalu sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menyejahterakan masyarakat.

Alokasi belanja hibah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat rata-rata sebesar 3,51%. Struktur anggaran belanja hibah dengan alokasi sebesar itu jelas terlalu kecil dan tidak akan mampu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat, terutama terkait dengan faktor-faktor yang dihitung dalam IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Apalagi mengingat jumlah angka penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2013 mencapai 4.382.648 jiwa atau 9,61% dari jumlah penduduk (BPS,2014:2).

Dalam penelitian ini, alokasi belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Belanja Bantuan Sosial merupakan

belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial dalam penelitian Yuwani (2011) merupakan salah satu jenis belanja yang meningkat drastis menjelang pemilihan kepala daerah. Pemberiannya yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat membuat risiko penyalahgunaan pemberian bantuan sosial menjadi tinggi sehingga tidak efektif dalam mencapai tujuan belanja bantuan sosial itu sendiri, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan bantuan sosial antara lain pernah terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tahun 2014. Penyalahgunaan terjadi dengan modus pemberian bantuan sosial kepada istri wakil Bupati Cirebon ([bandung.bpk.go.id](http://bandung.bpk.go.id)).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Kriteria pemberian bantuan sosial adalah diberikan kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Jawa Barat memiliki 9,61% penduduk miskin dari total jumlah penduduknya. Struktur anggaran belanja bantuan sosial dengan nilai alokasi yang kecil yaitu rata-rata sebesar 1,42% terbukti tidak mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial.

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data dan tidaknya pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Alokasi Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.  
(b) Variabel alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap IPM.

Hal ini berarti tingginya atau rendahnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak akan berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain: (a) Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat harus semakin cermat dalam mengalokasikan anggaran belanja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. (b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus dengan obyek dan rentang waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang lebih luas atas pengaruh belanja daerah terhadap IPM.

## Daftar Pustaka

- Abdulah, Sukry dan Asmara, JA. 2007. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik*. Jurnal riset akuntansi Indonesia, vol. 10 no. 1:19-31
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2011. <http://jabar.bps.go.id/subyek/luas-wilayah-jumlah-penduduk-kepadatan-penduduk-dan-persentase-total-penduduk-menurut> (Diakses tanggal 10 Desember 2014)
- \_\_\_\_\_. 2012. *Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011*. BPS Jawa Barat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Indeks Pembangunan Masyarakat 2012-2013*. <http://jabar.bps.go.id/subyek/indeks-pembangunan-manusia-ipm-jawa-barat-2012-2013> (Diakses tanggal 10 Desember 2014)
- \_\_\_\_\_. 2014. *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat No. 04/02/32/th.XVI tanggal 2 Januari 2014*
- \_\_\_\_\_. 2014. *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat No. 10/02/32/th.XVI tanggal 5 Februari 2014*
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 2014. *Kejari Cirebon Melakukan pemeriksaan kasus dana bantuan sosial*. <http://bandung.bpk.go.id/files/2014/12/Kejaksanaan-Negeri-Kabupaten-Cirebon-Periksa-Bantuan-Sosial.pdf>. (diakses 30 Desember 2014)
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendarmin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*. Kumpulan e-Journal Eksos Vol. 8 No. 3 Oktober 2012. Hal. 144-155
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Mailendra, Fitra. 2009. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan Faktor-Faktor*

- yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Mankiw, Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Diterjemahkan oleh: Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Maqin, Abdul. 2011. Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika volume 10 no 1, juni 2011 hal 10-18*.
- Mirza, Deni Sulistio. 2012. *Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di jawa tengah tahun 2006-2009*. Economics Development Analysis Journal 1, 2012. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>(Diakses tanggal 2 November 2014)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomot 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prayitno, Hadi. 2012. *Birokrasi Tambun; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai. Seknas FITRA*. <http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/>. (Diakses 2 November 2014).
- Provinsi Jawa Barat. *Sekilas Jabar*. <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1261>(Diakses tanggal 10 Desember 2014)
- Said, Mas'ud. 2008. *Arah baru otonomi daerah di Indonesia*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2014. *SPSS 22 from essential to expert skills*. Jakarta: PT Media Komputindo.
- Saragih, Panglima Juli. 2003. *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sumiyati, Euis Eti. 2011. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial vol. 7.januari 2011.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.